

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KABUPATEN TUBAN NOMOR 1
TAHUN 2018 TERHADAP LARANGAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
PERSPEKTIF *SIYASAH TASYRI'YAH***

SKRIPSI

Oleh

Yanuarita Nova Azkya

NIM. 05020421058



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanuarita Nova Azkya
NIM : 05020421058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1
Tahun 2018 Terhadap Larangan Pemasangan Alat Peraga
Kampanye di Tempat Umum Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 05 Juni 2025

Yang menyatakan,



Yanuarita Nova Azkya
NIM. 05020421058

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yanuarita Nova Azkya

NIM : 05020421058

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 Mei 2025

Pembimbing,



Dr. H. Moh. Syaiful Bahar, S.Ag, M.Si.

NIP. 197803152003121004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yanuarita Nova Azkya

NIM. : 05020421058

Judul : Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018
Terhadap Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat
Umum Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag. M.Si

NIP. 197803152003121004

Penguji III



Dr. H. Priyo Handoko SS, S.H., M.Hum

NIP. 196602122007011049

Penguji II



Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag

NIP. 196310151991031003

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, M.I

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 27 Juni 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yanuarita Nova Azkya
NIM : 05020421058
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
E-mail address : yanuaritanovaazkya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 Terhadap Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juni 2025

Penulis

(Yanuarita Nova Azkya)

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 terhadap larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum pada saat penyelenggaraan kampanye pilkada di wilayah Kabupaten Tuban. Dalam regulasi terkait termuat aturan-aturan yang salah satunya berupa larangan pemasangan alat peraga di tiang listrik dan pohon. Peraturan dibuat untuk ditaati, namun pada realitanya di Kabupaten Tuban masih banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye. Banyaknya alat peraga kampanye yang terpasang khususnya di pohon dan tiang listrik menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasinya. Selain melanggar ketertiban umum pelanggaran ini turut menjadi sampah visual yang merusak lingkungan dan keindahan kota. Persoalan ini dimuat dalam dua rumusan masalah: bagaimana implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 terhadap larangan pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum; dan bagaimana perspektif *siyasah tasyri'iyah* terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan *sociological jurisprudence*. Adapun pengambilan data pada skripsi ini dikumpulkan melalui metode observasi lapangan, wawancara pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban, dan dokumentasi pelanggaran. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif menggunakan pola pikir deduktif, yang mana data diolah kemudian diuraikan secara sistematis dan dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum dan konsep *siyasah tasyri'iyah*.

Hasil penelitian mencakup sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan regulasi dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye belum terlaksana dengan optimal, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang menghambatnya. Berdasarkan data hasil wawancara, diketahui faktor-faktor tersebut mencakup lemahnya substansi regulasi, lemahnya koordinasi antar institusi, kurangnya sumber daya aparat penegak hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan adanya budaya pragmatisme pada aturan yang berlaku. *Kedua*, jika ditinjau dalam perspektif *siyasah tasyri'iyah*, implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018 belum efektif dalam penegakan hukumnya, yang mana Bakesbangpol dan Satpol PP Kabupaten Tuban belum menerapkan prinsip *masalah ammah* (kemaslahatan umum) dalam pelaksanaan tugasnya.

Dengan demikian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: *Pertama*, perihal regulasi, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban memperjelas substansi hukum dengan pemberian sanksi serta menguraikan batasan kewenangan antar institusi. *Kedua*, perihal aparat penegak hukum, diharapkan membangun koordinasi yang baik antar institusi dan menindaklanjuti dengan segera terhadap tiap pelanggaran yang ditemukan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KERANGKA TEORI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KONSEP SIYASAH TASYRI'YAH DALAM PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI	27
A. Tinjauan Umum Alat Peraga Kampanye	27
1. Pengertian Alat Peraga Kampanye.....	27
2. Jenis-Jenis Alat Peraga Kampanye	30
3. Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018.....	31
B. Teori Efektivitas Hukum.....	33
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum.....	33
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum.....	36
C. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i> Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati	41
1. Pengertian <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	41

2. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	48
3. Dasar Hukum <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	53
BAB III PELAKSANAAN PENERTIBAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN TUBAN NOMOR 1 TAHUN 2018	56
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
1. Profil Kabupaten Tuban	56
2. Kondisi Geografis	57
3. Pembagian Wilayah Administratif	58
4. Deskripsi Lokasi Penelitian	60
B. Gambaran Umum Objek Penelitian	61
1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban	61
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban	65
C. Penertiban dan Penegakan Terhadap Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018	68
1. Hasil Wawancara Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban dalam Penegakan dan Penertiban Pemasangan Alat Peraga Kampanye	69
2. Hasil Wawancara Terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye	74
3. Hasil Observasi	79
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERTIBAN DAN PENEGAKAN PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM	84
A. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018	84
B. Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum Perspektif <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	97
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Tuban	60
Gambar 3.2 Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Tuban	64
Gambar 3.3 Susunan Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Tuban	67
Gambar 3.4 Pelanggaran Pemasangan APK di Pohon.....	80
Gambar 3.5 Pelanggaran Pemasangan APK di Tiang Listrik	80

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Pelanggaran APK di Lokasi Penelitian.....	81
Tabel 3. 2 Jumlah Pelanggaran APK pada Periode Pilkada 2020-Pilkada 2024	82



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustri and Amiruddin Sijaya. *Menyongsong Pemilu Dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2021.
- Al Khanif. *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*. Indonesia: Penerbit & distribusi, LKiS, 2017.
- Citrano, Dede Ika Murofiqoh, Jayanti Puspitaningrum, and Abdul Kahar Maranjaya. *Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Desty Putri Hanifah, Supadmi, Mustafa, Sigit Wibowo, and Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani. *Teori Dan Prinsip Pengembangan Media Pembelajaran*. Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2023.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Eko Handoyo. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Fajlurrahman Jurdi. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018. Ferdinand Fassa and Asmiyanti. *Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Das Sollen & Das Sein*. Jakarta: Podomoro University Press (PU Press), 2024.
- Fetrus, Aturkian Laia, and Hadiman. *Penerapan Hukum Adat Dayak Kalimantan*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2024.
- Golkar Pangarso R.W. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022.
- Haswandi. *Tanggung Jawab Perdata Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dan Ahli Warisnya (Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023.
- Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Imam Amrusi Jailani, Nur Lailatul Musyafa'ah, and Hasan Ubaidillah. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.
- Jun Mawalidin. *Penal Policy (Kebijakan Hukum Pidana Islam): Penanggulangan Korupsi Di Indonesia Pada Masa Covid-19 Dan Umumnya Perspektif Siyasah Tasyri'iyah*. Bogor: Guepedia, 2014.

Mardani. *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2024.

Maryam Salampessy, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Diki Zukriadi, and Yola Yustrisia. *Penegakan Hukum Pemilu*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam."* Jakarta: Kencana, 2014.

Pusat Informasi Sumber Daya Manusia (PISDM). *Buku Saku Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2019 (Untuk Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa)*. Jombang: Bawaslu Kabupaten Jombang, 2018.

Rahmaniah. *Pengamanan Demonstrasi Dalam Fiqh Siyasah*. Palembang: Bening: Media Publishing, 2021.

Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Jakarta: Amzah, 2019.

Syukri. *Kearifan Lokal Dalam Kampanye Politik*. Indramayu: Peenerbit Adab: CV. Adanu Abimata, 2024.

JURNAL

Asnaniah, Bruce Anzward, and Galuh Praharafi Rizqia. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Di Kota Balikpapan." *Jurnal Lex Suprema Fakultas Hukum Universitas Balikpapan* 1, no. 2 (2019): 1–19.

Assyayuti, Mazdan Maftukha, Aulia Rachman Eka Putra, and Dandi Dwie Lisadi. "Problematisasi Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Dampak Sampah Visual." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 2, no. 5 (2024): 184–197.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33.

Fazhira, Shazlin, and Irwansyah Irwansyah. "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (June 30, 2023): 558.

Rahman, Nadya Nur, Rahayu Sri Utami, and Agung Zainal Muttakin Raden. "Analisis Tipografi pada Spanduk Pemasaran Perumahan." *Jurnal Desain* 5, no. 03 (Agustus 2018): 250.

Sihombing, Rizky Darmawansyah. "Problematisasi Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet (Jurnal Hukum*

Tata Negara & Hukum Administrasi Negara) 3, no. 1 (January 30, 2024): 300–314.

Yudesman. “Prinsip-Prinsip Dan Kaidah-Kaidah Hukum Islam.” *Jurusan Syariah STAIN Kerinci* 11, no. 1 (July 2014).

SKRIPSI

Angkotasan, Muhammad Rizki. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kota Tidore Kepulauan.” Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, 2024.

Bella Yuana Putri. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Tiuh Mulya Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Dede Suryanti. “Analisis Siyasah Tasyri’iyyah Terhadap Pencalonan Mantan Terpidana Menjadi Anggota Legislatif, Dewan Perwakilan Daerah Dan Kepala Daerah Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Desi Audina. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Dhea Patricia. “Analisis Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Berdasarkan Konsep Siyasah Tasyri’iyyah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Prngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.

Peraturan Bupati Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2018.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Bupati Tuban Nomor 7 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tuban.

WEBSITE

"59,27 Ribu Penduduk Tuban Berpendidikan Tinggi pada Juni 2024". Katadata Media Network, 14 Oktober 2024, akses 07 April 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/88d27bf3e632ec5/5927-ribu-penduduk-tuban-berpendidikan-tinggi-pada-juni-2024>.

Al-Qur'an.

"Baliho, Partai Politik dan Pendidikan politik". Universitas Muhammadiyah Jakarta, akses 26 Maret 2025. <https://umj.ac.id/opini/baliho-partai-politik-dan-pendidikan-politik/>.

"DLHP Tuban Temukan 33 APK Paslon Langgar Perda dan Perbup, Terpasang di Pohon". blokTuban.com, 14 Oktober 2024, akses 20 Oktober 2024. <https://www.bloktuban.com/2024/10/14/dlhp-tuban-temukan-33-apk-paslon-langgar-perda-dan-perbup-terpasang-di-pohon>.

"Geografi Kabupaten Tuban". Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban, akses 11 April 2025. [Geografi | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban](https://www.kabupatentuban.go.id/geografi).

"Kabupaten Tuban". DPRD Kabupaten Tuban. akses 08 April 2025. <https://dprd-tuban.go.id/profile/kabupaten-tuban/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). akses 25 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/kampanye>.

"Penyelenggaraan Kampanye Didominasi Pelanggaran Administrasi". Radar Bojonegoro, 28 November 2020, akses 11 April 2025.

<https://radarbojonegoro.jawapos.com/nasional/711312066/penyelenggaraan-kampanye-didominasi-pelanggaran-administrasi>.

"Penertiban APK di Tuban Masih Ngambang, Tim Satgas Tak Jalan-Rekomendasi Bawaslu Diabaikan". Radar Tuban, 28 Desember 2023, akses 19 Oktober 2024. <https://radartuban.jawapos.com/daerah/863665529/penertiban-apk-di-tuban-masih-ngambang-tim-satgas-tak-jalan-rekomendasi-bawaslu-diabaikan>.

"Penertiban APK, Bawaslu Tuban Lakukan Pengawasan". Radio Republik Indonesia, 24 November 2024, akses 11 April 2025. <https://rri.co.id/index.php/pilkada-2024/1141431/penertiban-apk-bawaslu-tuban-lakukan-pengawasan>.

WAWANCARA

Siswanto. "Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban," Maret 11, 2025.

Ngadri. "Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Masyarakat Bakesbangpol Kabupaten Tuban," Maret 12, 2025.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A